

Resensi Buku:

MEMPERTAUTKAN DUA HATI, DUA NEGARA BANGSA

Judul Buku	: Seperti Bulan dan Matahari, Indonesia dalam Catatan Seorang Diplomat Amerika
Penulis	: Stanley Harsha
Pengantar	: Azyumardi Azra
Penerbit	: Kompas, Mei 2015
Kategori	: Catatan pengamatan personal tentang sosial, budaya, dan politik, <i>human interests</i>
Tebal	: 254 halaman
Penulis Resensi	: Mestika Zed



MEMBACA judul buku Stanley Harsya, *Seperti Bulan dan Matahari dalam Catatan Seorang Diplomat Amerika* (2015), saya jadi teringat dengan buku karya sejarawan Amerika, Harry J. Benda, berjudul *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (edisi terjemahan, 1985). Mirip tapi beda. Benda menggunakan metafora “bulan sabit” (simbol Islam) dan “matahari terbit” (simbol Jepang) untuk menggambarkan tentang kebijakan rejim Jepang terhadap Islam Indonesia pada masa Perang Dunia II (1942-1945). Seperti halnya dengan Benda, Pak Stanley juga menggunakan metafora planet jagad-semesta, yang akrab dengan planet bumi, “bulan” dan “matahari” untuk menggambarkan “kehangatan” hubungan antara dua hati dan — dengan harapan demikian jugalah hendaknya — antara dua negara-bangsa yang berbeda, Indonesia dan Amerika

Serikat (AS). Apakah dia berhasil? Membaca sampai tamat buku ini, orang akan tahu jawabannya.

Tentu tak layak membandingkan isi kedua buku ini karena masing-masing ditulis untuk tujuan berbeda. Benda menulis buku itu untuk keperluan akademik (disertasi) dan dengan demikian titik perhatian bukunya terpumpun pada satu isu sentral “Islam Indonesia” di zaman Jepang. Dalam “Kata Pengantar”-nya untuk buku Benda, Prof. Wertheim dengan jitu menyimpulkan, bahwa “...*matahari terbit* sia-sia mencoba menarik *bulan sabit* untuk menetap di dalam orbitnya. *Bulan Sabit* terlalu besar untuk menjadi satelit yang tidak berbahaya bagi siapa pun, untuk sekedar menjadi sebuah sputnik”. Sementara itu buku Pak Stanley bukan dimaksudkan sebagai buku akademik, melainkan sebuah kenang-

kenangan hidup seorang mantan diplomat AS. Ia lebih merupakan sebuah *memoir* pribadi atau *reminiscent*s — meminjam istilah Prof. Azyumardi Azra dalam Kata Pengantar untuk buku yang sedang kita perbincangkan ini.

Namun lebih daripada itu, buku ini adalah catatan pengamatan kritis tentang berbagai segi kehidupan masyarakat Indonesia di mata penulis *cum* Amerika Serikat. Buku ini bahkan dilengkapi dengan ilustrasi tabel statistik mengenai isu-isu tertentu seperti pandangan negatif Amerika tentang Islam dan lain-lain (pp. 125-27). Dengan kata lain buku ini memuat serba-serbi tentang Indonesia dan sekaligus menunjukkan keluasan wawasan penulisnya soal budaya Nusantara yang beragam, termasuk pandangannya tentang etika dan adat perkawinan Jawa, yang ditimba dari calon mertuanya dan kini menjadi anggota keluarga mertuanya dari Jawa. Tujuan buku ini, dalam kata-kata penulisnya sendiri, adalah “... supaya orang Indonesia bisa melihat bagaimana seorang mantan diplomat memandang Indonesia dan bagaimana Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai negara yang penuh toleransi...”.

Seperti Bulan dan Matahari terdiri dari lima bagian. Masing-masing bagian terdiri dari sejumlah subjudul. BAGIAN SATU: *Kehidupan*, BAGIAN DUA: *New York City hingga Bali*; BAGIAN TIGA: *Nilai-Nilai dan Keimanan*; BAGIAN EMPAT: *Gugur Satu Tumbuh Seribu*; BAGIAN LIMA: *Dari Sabang sampai Merauke*. Bagian pertama

tentang *Kehidupan*, lebih merupakan sebuah refleksi yang bersifat sangat pribadi tentang budaya Indonesia dan Amerika berdasarkan pengalaman personal yang terkait dengan Solo dan teman-teman sejawat. Baginya Solo adalah ‘permata budaya’, kota tempat asal nenek moyang keluarga isterinya dan juga kota kelahiran Presiden Indonesia yang sekarang (Joko Widodo), yang sudah dikenalnya sejak Presiden RI itu menjadi walikota di sana. Pada bagian ini ia juga mengemukakan pandangannya tentang masa pemerintahan Jokowi sebagai masa yang paling menarik dan menjanjikan, seperti juga pandangan resmi negaranya, mendukung Jokowi.¹

Bagian kedua: *New York City hingga Bali* berbicara tentang kesulitan yang dihadapi penulis sebagai orang Amerika beristeri Indonesia terkait dengan kejadian-kejadian paska-peristiwa 11 September 2001 (tragedi “nine-eleven”). Pada waktu itu timbul kebencian dan ketakutan terhadap Islam, *Islamofobia*, karena munculnya sinyalemen resmi Amerika bahwa kasus penyerangan gedung WTC itu terkait dengan terorisme dari kelompok al-Qaida dan Osama bin Laden, yang serta merta digeneralisasikan dengan kelompok orang Islam. Pada saat yang sama di Indonesia dan di dunia Islam muncul

¹ Pandangan ini adalah interpretasi saya pribadi berdasarkan hasil diskusi dan dialog publik yang diselenggarakan PKSBE tentang “Pilpres 2014 Di Mata Dunia (Amerika Serikat)”, *Keynote Speaker* Prof. Dr. Jeffrey Hadler, guru besar sejarah, Berkeley University California, USA, PKSBE, Padang, 20 Juni 2014 lalu.

kemarahan terhadap Amerika yang sembarang menuduh, sementara membenarkan kebijakannya melakukan tindakan teroris terhadap negara-negara Islam, Irak, Iran dan Afghanistan. Stanley harus menerangkan kebijakan Amerika Serikat dan tentang masyarakat Amerika kepada publik Indonesia dan Amerika, bahwa pemerintah AS tidak memahami dunia Islam. Ia mengaku gagal mendapatkan dukungan justru karena ketidakpahaman itu, sehingga tragedi-tragedi besar menimpa Amerika (New York) dan Indonesia (bom Bali).

Pada bagian ketiga, *Nilai-Nilai dan Keimanan* Stanley berbicara tentang dimensi yang lebih halus (*subtle*), yaitu jarak budaya antara Indonesia dan Amerika/Barat yang menimbulkan banyak kesalahpahaman. Di sini dia mengajukan semacam *appeal*, meminta kepada kedua negara dan bangsa ini agar lebih bersikap toleran, dan berharap agar masyarakat Amerika bekerja lebih keras untuk menerima pengintegrasian secara penuh golongan umat Islam Amerika ke dalam masyarakat Amerika yang cenderung masih diperlakukan diskriminatif. Sebaliknya meminta agar pihak Indonesia bekerja keras melunakkan elemen garis keras Islam Indonesia berdasarkan nilai-nilai dan etika (keimanan) yang berbeda-beda.

Bagian keempat, *Gugur Satu Tumbuh Seribu* berbicara tentang keberhasilan Indonesia secara mengagumkan dalam menumbuhkan demokratisasi dan pada saat yang sama mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua negara. Pada bab ini saya agak susah memahami judul sub-bab

ini: *Gugur Satu Tumbuh Seribu* yang membahas topik-topik “Taman Mini”, “*democracy*”, “Lapor Ayam Hilang, Kambing pun Hilang”, “Pasukan Siluman” dan “Perbudakan”. Saya hanya dapat menduga bahwa persoalan-persoalan di Indonesia, termasuk birokrasinya sangat “berjibun” dan setia dikorek ada saja masalah dan semua ini tak [akan] pernah terselesaikan jika tidak ada kesungguhan dan ketulusan.

Akhirnya Bagian kelima, *Dari Sabang sampai Merauke* adalah pengalaman dan keterpesonaannya dengan aneka budaya Nusantara dan perjumpaan penulisnya dengan tokoh-tokoh pemikir dan budayawan Indonesia. Lima daerah yang amat mengesankan baginya ialah Aceh, Sumatera Utara (tempat ia pernah berdinasi di Medan), Sumatera Barat, Papua dan Timur Lesta dan beberapa tokoh yang pernah dijumpainya dan memiliki kesan khusus seperti Jokowi, Mochtar Lubis, Pramudya Ananta Toer, Cak Noer, novelis Ahmad Fuadi, Shofwan Karim dan lain-lain.

Tema utama buku ini adalah tentang hubungan Indonesia-Amerika dan pengalaman penulisnya di kedua negara dan bangsa tersebut, baik selaku pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai diplomat dan mantan diplomat. Hubungan Indonesia-Amerika adalah sesuatu yang kompleks dan rumit. Ia mungkin mirip dengan pengalaman pribadi penulis dalam mendapatkannya dari perempuan Indonesia yang kemudian menjadi isterinya, Ibu Henny Mangoendiporo Harsha. Di

situ ada suka-duka. Pengalaman pahit dan menyenangkan. Buku ini di satu sisi memuat hal-hal yang ringan dan romatik berupa *human interests*. Namun di sisi lain ia juga membuka halaman-halaman “yang lebih gelap dan serius”, meminjam frase penulis buku ini, tentang hubungan kedua negeri. Pada titik ini hubungan Indonesia dan Amerika dalam sejarahnya mengalami pasang surut. Ada masa-masa ketika hubungan keduanya berjalan tidak seperti “bulan” dan “matahari”, melainkan diliputi oleh gerhana berat dan ringan, sehingga membuat hubungan kedua negara tergerus.

Mengingat luasnya cakupan isi buku ini, maka izinkan saya membatasi pembahasan pada “sisi-sisi yang lebih gelap dan serius” tentang hubungan Indonesia-AS. Sebagian besar berasal dari kebijakan politik luar negeri AS, yang terkadang membuat suasana hati sebagian besar orang Indonesia kian khawatir dan pesimistik (*cautiously pessimistic*), suatu kebalikan dari yang dirasakan Pak Stanley, yang berpandangan optimistik (*cautiously optimistic*), walaupun tetap sadar dengan rintangan yang menantang ke depan (p. 230). Dalam hubungan ini saya mengacu pada beberapa kasus yang juga disinggung Pak Stanley secara agak panjang lebar.

Dalam buku ini, Pak Stanley memberikan contoh, ketika terjadi huru-hara pada masa transisi dari rejim Soekarno ke Soeharto tahun 1965/66, Kedubes AS di Jakarta ikut bertanggung jawab dalam membo-

corkan nama-nama orang dan kelompok penganut komunis kepada pasukan keamanan RI, sehingga terjadilah prahara, tragedi yang menyedihkan itu. Suatu sejarah hitam, the “*killing field*” atas nama “pembersihan” anasir G 30 S/ PKI 1965-1966 dalam sejarah Indonesia kontemporer (p. 68).

Kebanyakan orang Indonesia juga belum melupakan dukungan Amerika terhadap rejim Soeharto yang kejam pada ia berkuasa. Namun kalau ditarik lebih ke belakang lagi, kita juga akan berjumpa dengan gerigi-gerigi tajam yang membuat hubungan kedua negara tergerus dan yang paling merasakan akibatnya adalah pihak Indonesia.

Pada awal kemerdekaan, misalnya, AS cenderung bersikap pro-Belanda dan sebaliknya tidak mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini dapat dimengerti karena Belanda adalah sekutu AS dalam PD II dan karena itu ikut membantu restorasi kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada waktu itu perwakilan Amerika di Jakarta masih dalam bentuk Konsulat, belum ada Kedutaannya. Konsul AS di Jakarta waktu itu, Merle Cotchran, berperan menyalurkan bantuan logistik AS kepada pihak Belanda, termasuk amunisi dan seragam. Kesaksian George McT Kahin sekali waktu pernah menyebutkan bahwa “serdadu Belanda belum sempat mencopot lebel “*US Army*” pada seragam mereka ketika melakukan patroli di lapangan.” Kehadiran Konsulat AS di Jakarta di lain pihak sangat menyulitkan pihak Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan

mereka, terutama pada tahun-tahun pertama, 1945-1947.

Pandangan Amerika terhadap Indonesia baru berubah seratus delapan puluh derajat setelah pasukan Republik Indonesia berhasil membinasakan “kudeta PKI” di Madiun September 1948. Sejak itu AS mulai bersimpati dengan perjuangan RI dan berada di garis terdepan dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama forum diplomatik di PBB dan dunia internasional pada umumnya. Para pemimpin Indonesia tidak bisa melupakan jasa tokoh Dr. Frank Graham, mantan Rektor University of North Carolina at Chapel Hill, dalam posisinya sebagai salah seorang anggota KTN dan peran sentral yang dimainkannya sebagai perunding andal dalam membela kepentingan Indonesia dalam perundingan dengan Belanda dan dalam menjamin dukungan rakyat dan pemerintahan AS terhadap Indonesia.

Pada tahun 1950-an, saat ”perang dingin” antara blok Barat (kapitalis) dan Timur (komunis) kian berkecamuk, sekali lagi intervensi AS terhadap masalah domestik Indonesia membuat hubungan Indonesia-AS terganggu. Indonesia yang sejak semula menganut sikap politik ”non-blok” (*non-alignment*) oleh *John Foster Dulles*, menteri luar negeri AS pada tahun 1950-an dianggap sebagai *amoral*. Mungkin karena Presiden Soekarno waktu itu lebih condong ke blok Timur, sehingga AS bersikap memusuhi pemerintah Indonesia. Sebaliknya mereka berpaling membantu pemberontakan PRRI menentang rejim Jakarta. PRRI di mata AS

identik dengan perlawanan Luar Jawa terhadap rejim Jawa dan lebih penting lagi cenderung anti-komunis. Dukungan AS terhadap PRRI tidak hanya memberi ruang diplomatik PRRI ke luar negeri, melainkan juga ’droping’ senjata, amunisi dan logistik perang lewat pesawat terbang dan kapal selam. Namun ketika perlawanan luar Jawa itu tidak lagi menunjukkan taringnya, AS berbalik mendukung Jakarta. Sikap kucing-kucingan semacam ini sudah biasa dalam politik luar negeri AS. Itu terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga pada periode yang lebih kemudian.

Dalam perkembangan mutakhir, hubungan Indonesia dan Amerika juga diluipi oleh rasa ’gana’ dan gerhana. Perkenankan saya mengulas beberapa kasus yang mencuat baru-baru ini, seperti yang dibicarakan penulis secara agak panjang lebar.

- Kasus *Charlie Hebdo* di Paris, 7 Januari 2015 (p. 132-42).

Pada awal tahun baru 2015 yang lalu, publik dunia tiba-tiba dikejutkan oleh serangan kelompok bersenjata ke kantor harian *Charlie Hebdo* di Paris, Prancis. Dua orang bersenjata api mendobrak masuk ruangan redaktur harian itu. Mereka serta merta melepaskan tembakan membabi buta, sehingga menewaskan 12 orang. Pada hari hari berikutnya, tanggal 7 dan 9 Januari, terjadi lagi penyanderaan oleh kelompok yang sama di sebuah supermarket di ibukota Perancis itu. Sebanyak 17 orang tewas di tempat lokasi berbeda, tetapi semuanya bukan oleh mereka yang dituduhkan

sebagai kelompok ‘teroris’, melainkan oleh pasukan keamanan Perancis.

Pak Stanley menganalogikan kasus *Charlie Hebdo* dengan “Peristiwa 9/11” atau “Bom Bali” Perancis (p. 132). Segera setelah tragedi terjadi, warga Perancis dan masyarakat “seluruh dunia” bersatu melawan teror ini dengan mengusung slogan “*Je suis Charlie*” (Saya adalah Charlie). *Charlie Hebdo* adalah harian *satire* yang suka menyindir dan kadang mencemooh secara kasar lewat kartun, dan karikatur. Mereka biasanya menyerang gerakan ekstrem kanan, agama (Islam, Yahudi dan Katolik), seperti juga perilaku politik, dan budaya. Rejim pers dan pemerintah Barat langsung mengecam serangan itu dan membeberkan secara kronologis peristiwa tersebut. Namun jarang mau mengupas penyebab yang lebih luas dalam konteks isu besar mengapa peristiwa semacam itu bisa terjadi. Mereka hanya melihat dari perspektif korban, tetapi enggan menyigi dari perspektif pelaku. Bagaimanapun, kasus penembakan di kantor redaksi *Charlie Hebdo* pada 7 Januari itu, secara langsung berkaitan erat dengan pemuatan kartun-kartun *Charlie Hebdo* yang menghina Nabi Muhammad SAW.

Pak Stanley tampak bersikap *fair* dalam mengulas kasus ini. Walaupun sangat mengecam dan tidak dapat membenarkan tindakan kekerasan terhadap kebebasan informasi, ia melihat kasus itu sebagai bagian dari masalah yang lebih besar, yaitu masalah nilai dan etika dan kehormatan martabat Islam. Ini adalah persoalan yang rumit dan saya

kira ulasan Pak Stanley ada benarnya. Di Barat pemujaan terhadap ‘kebebasan’ mengatasi nilai-nilai agama dan bahkan itulah agama mereka. Orang bebas menyatakan pendapat fikirannya tanpa peduli yang lain. Orang bebas menghina atau memperolok-olokan siapa saja karena kebebasan dilindungi. Begitu kira-kira ide dan semangat individualisme Barat. Namun di samping itu, mereka alpa bahwa sikap semacam itu juga tidak konsisten. Orang mudah lupa dengan kejadian puluhan tahun sebelumnya yang juga terjadi di Perancis. Sebuah aksi kekerasan paling mematikan dalam kasus pengeboman kereta Vitry-Le-Francois, Paris, Perancis yang dilakukan kelompok yang menamakan dirinya *Organisation de l’Armee Secrete* (OAS – Organisasi Tentara Rahasia) pada tahun 1961. Kejadian tidak mendapat reaksi yang sependam dengan kasus *Charlie Hebdo*, seperti juga dalam banyak kasus yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina dan di Eropa lainnya. Ketakutan dan kebencian terhadap Islam (*Islamofobia*), suka atau tidak suka, memang sudah bercokol selama berabad-abad dalam peradaban Barat. Tidak heran jika kelompok Al Qaeda mengaku bertanggung jawab atas serangan di kantor *Charlie Hebdo* tersebut sebagai “tindakan balas dendam atas kehormatan Islam.”

Untuk mengulas kasus ini, Pak Stanley juga mengutip pandangan kritis dan berimbang dari sejumlah pengamat Barat. Ia pun juga tak menutup-nutupi kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan CIA terhadap orang-orang Islam, yang tak

bersalah di Irak dan Afganistan, bahkan juga di penjara Amerika dan beberapa kasus lain. Tadinya saya berharap Pak Stanley juga akan menggali pandangan Indonesia terhadap kasus *Charlie Hebdo*. Tetapi itu tidak diketemukan. Saya pun tidak begitu menyesal karena memang tidak dapat berharap banyak terhadap pemimpin dan kaum intelektual Islam Indonesia. Apakah karena Islam di negeri ini berbeda dari Islam Arab dan tempat lain, seperti dikatakan Prof. Azyumardi Azra, Islam *Wasatiyyah*, mirip dengan politik luar negeri Indonesia “yang bebas aktif” atau karena tidak punya pendirian. Kalau begitu wajar kalau *John Foster Dulles*, menteri luar negeri AS pada tahun 1950-an, bisa mengatakan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bersikap non-blok (*non-alignment*) itu *amoral*.

- Sikap politik luar negeri AS yang mendua (*double standard*).

Sikap politik AS terhadap konflik Israel-Palestina *cum* umat Islam di dunia dianggap munafik oleh kebanyakan orang Indonesia. Fakta bahwa Amerika lebih berpihak dan mendukung Israel ketimbang Palestina tidak bisa dibantah. Kenyataannya memang demikian. Setiap kali dimunculkan keputusan DK-PBB yang terkesan merugikan Israel, maka AS selalu menggunakan hak vetonya. AS mengklaim dirinya sebagai “pengawal demokrasi di dunia”, tetapi di lain pihak tak keberatan mendukung rejim diktator/otoriter di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Indonesia di zaman Soeharto dan bahkan juga Filipina di zaman

Marcos. AS dengan lantang menyuarakan sikap kerasnya terhadap pelanggaran hak azazi manusia, tetapi itu hanya berlaku di pemerintahan negara-negara yang menjadi musuhnya seperti Korea Utara, Libya, Iran, Irak dan Afganistan. Sesungguhnya “Amerikalah yang teroris”, begitu Pak Stanley mengutip sebuah poster para demonstran di Jakarta (p. 69).

- Menyamakan Islam dengan terorisme.

Erat kaitannya dengan isu-isu di atas, Pak Stanley juga membahas tentang perspesi yang berkembang dalam tubuh pemerintahan AS tentang Islam yang cenderung menggeneralisasi Islam sebagai terorisme. Pak Stanley menulis:

Ultimatum Presiden George Walker Bush (Jr.), yang memaksa dunia untuk mendukung Amerika Serikat dalam perang melawan teroris memperkuat ketakutan Indonesia, bahwa militer AS merupakan ancaman untuk Indonesia. Apalagi Presiden Bush menggambarkan perang AS melawan terorisme sebagai Perang Salib. “Perang Salib ini adalah perang melawan terorisme” demikian Bush (p. 67).

Mereka yang paham sejarah tentu dapat menafsirkan pernyataan Bush itu secara implisit dialamatkan kepada umat Islam. Sengaja atau tidak, pandangan semacam itu menyediakan jerami kering di musim panas. Pak Stanley tidak hanya membahas reaksi Indonesia terhadap pernyataan keliru “*cowboy Bush*” yang membabi buta, melainkan juga mengutip reaksi

kalangan pemuka agama di Amerika yang menganggap pernyataan Bush itu sebagai “kecerobohan” dan bahkan sangat berbahaya. Teror-kontra-teror. Namun nasi sudah jadi bubur. Media Barat dan analisis sejumlah pakar Amerika, sedikit banyak, berhasil menanamkan wacana Islam dan terorisme dan/ atau radikalisme. Buku Samuel Huntington tentang *the Clash of Civilization* (1996), misalnya, cukup digemari di Indonesia. Paska peristiwa 11 September 2001, yang dalam media Barat disebut tragedi “*nine-eleven*” sehubungan dengan serangan yang merontokkan gedung pencakar langit WTC di New York, AS, ketakutan dan kebencian terhadap Islam semakin meningkat. Pandangan negatif terhadap Islam di kalangan politisi Demokrat dan Republik sebagaimana digambarkan dalam tabel (p. 125), menunjukkan hampir 60% kelompok konservatif (Republik) bersikap negatif terhadap Islam dan parati Demokrat yang liberal dan moderat relatif lebih rendah (hampir 20%). Analisis intelijen AS yang didukung oleh para jenderal purnawirawan memberikan kesimpulan yang lebih mengerikan, pendekatan militer terhadap terorisme yang dialamatkan ke kelompok Islam. Namun harap dipahami bahwa pandangan resmi pemerintah AS adalah sesuatu yang berbeda dengan pandangan rakyat Amerika dalam arti luas. Kecuali segelintir kelompok radikal, rata-rata bersikap baik dan positif terhadap Islam.

Namun di Indonesia kebencian terhadap AS paska 11/09/2001 juga meningkat karena sikap politik AS

yang keras terhadap yang mereka anggap sebagai terorisme/Islam. Seiring dengan ini, maka belum lama ini, sebuah diskusi bertema “Islam dan Radikalisme” pernah diadakan oleh IAIN Imam Bonjol Padang, sangat menarik, meskipun terkesan kurang menyadari bahwa tema seperti itu, secara langsung atau tidak langsung, membenarkan adanya korelasi keduanya, kalau bukannya ikut meramalkan wacana propaganda Bush.

Terakhir tentu terlalu berharga untuk melewatkan catatan Pak Stanley tentang kesan-kesannya tentang Sumatera Barat, kampung halaman orang Minangkabau. Sebagai mantan diplomat, ia memiliki akses ke banyak orang dan tokoh, seperi juga kesempatan melakukan perjalanan dari Sabang sampai Merauke (bagian LIMA). Di Sumatera Barat kenalan baiknya ialah Dr. Shofwan Karim, dosen senior IAIN Imam Bonjol Padang, aktivis dan intelektual Islam terkemuka di daerah ini (p.108). Pak Stan tak hanya teringat dengan “nasi padang” dan “Bundo Kandung” (sistem matrilineal). Beliau juga berempati dan terlibat langsung dalam menangani G 30 S/ 2009, bencana paska-gempa dahsyat 30 September 2009.² Stanley, penulis buku ini, tentu

² Penelitian saya tentang sejarah gempa dahsyat 30 September 1009 (“G 30 S 2019”) menyimpulkan bahwa manajemen penanganan bencana paska Gempa terkesan agak “kedodoran”, terutama dalam melayani bantuan dan donasi pihak luar, baik domestik maupun luar negeri. Mestika Zed, “*Inventarisasi dan Rekonstruksi Sejarah Gempa Padang, 30 September 2009*”, Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE), Universitas Negeri Padang, 2012.

bukan orang Amerika pertama, yang memiliki pengalaman tangan pertama di tanah Minangkabau. Lebih dua abad silam, sekitar tahun 1780-an, atau beberapa tahun setelah kemerdekaan 4 Juli 1776, kapal-kapal dagang Amerika pertama sudah berlabuh di Muaro, Pantai Padang mengangkut kopi Minangkabau Kota Salem, Massachusetts, AS. Sejak itu mereka datang dan pergi ke Sumatera Barat, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan dinas atau kerja sama bilateral.

Bagaimana pun, buku ini, bagi saya secara keseluruhan menarik dan penting. Ia tidak hanya enak dibaca dan lugas bahasanya (maklum penulisnya juga mantan wartawan), tetapi juga memuat banyak informasi baru tentang Indonesia yang belum tentu diketahui oleh kebanyakan orang Indonesia. Buku ini tidak hanya perlu dibaca oleh kaum intelektual, akademisi, maupun politisi dan calon diplomat. Penulisnya dengan rendah hati mengaku bahwa karya ini sebagai upaya memperkenalkan hubungan Indonesia-Amerika dari perspektif pribadi atas pengamatannya sebagai mantan diplomat. Namun dalam banyak hal ia mampu bersikap kritis dan obyektif dalam menilai kasus-kasus tertentu. Lebih dari itu buku ini memuat banyak pengetahuan baru dan mengandung banyak pembelajaran. Sebagai penutup izinkan saya mengutip kata-kata bijak dari seorang penulis terkemuka, "*What I like in a good author is not what he says, but what he whispers ...*".

Padang, 28 Mei 2015.

Mestika Zed
Alumnus Vrije Universiteit, Amsterdam,
Direktur Pusat Kajian Sosial-Budaya &
Ekonomi (PKSBE) FIS,
Universitas Negeri Padang.